

Konsultasi Publik I Dokumen Awal RZWP3K Propinsi Sumatera Selatan
Palembang, 13 Maret 2018

Konsultasi Publik I Dokumen Awal ini dihadiri oleh OPD Sumsel, dan unsur yang mewakili masyarakat yang hadir adalah WALHI, sementara dari perguruan tinggi dan perwakilan masyarakat lain tidak hadir. Acara dibuka oleh Kepala Dinas KP Sumsel, selanjutnya arahan dari Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional- Ditjen PRL-KKP.

1. Sambutan dari Kadis KP Sumsel:

- a. Penyusunan Dokumen RZWP3K sudah dimulai sejak tahun 2013 dalam pengumpulan data primer.
- b. Target tahun 2018 adalah terselesaikannya Dokumen hingga Penetapan Perda RZWP3K.
- c. Beberapa kegiatan strategis propinsi/kabupaten yang memanfaatkan ruang laut, misalnya pembangunan pelabuhan dan pembuatan alur baru, atau budidaya, belum bisa dilanjutkan sebelum ada Perda RZWP3K, sehingga sangat penting penyusunan Dokumen ini segera diselesaikan.

2. Arahan Kasubdit TRLN Dit PRL:

- a. Yang menyusun RZWP3K adalah Pemerintah Daerah melalui Pokja yang ditetapkan oleh SK Gubernur Sumsel, yang dapat melibatkan pihak ketiga/Perguruan Tinggi dalam menyiapkan materinya.
- b. 3 kamar dalam proses Perda RZWP3K: 1) KKP (muatan teknis), 2) DPRD (legislasi), 3) Kemendagri (evaluasi Ranperda).
- c. Dalam KP 1 ini akan menyepakati 2 peta, yaitu peta eksiting dan peta perencanaan pemanfaatan ruang laut, oleh karena itu seluruh stakeholder yang kegiatannya memanfaatkan ruang laut harus hadir dan menyepakati.

3. Proses Verifikasi Peta:

- a. Perwakilan OPD melakukan verifikasi langsung peta eksiting dan peta perencanaan
- b. Dalam proses verifikasi masing OPD dan peserta diberikan kesempatan satu-persatu untuk memverifikasi peta yang sudah dipersiapkan tim Pokja.
- c. Selain itu peserta diminta pula untuk memberikan masukan secara tertulis dalam form yang telah disiapkan dan data dukung terhadap verifikasi peta yang telah dilakukan kepada Tim Pokja untuk ketepatan lokasi koordinatnya.

Lampiran Foto-foto Dokumentasi KP I Penyusunan Dokumen RZWP3K Sumsel



Gambar. Kadis KP Prop Sumsel dan Kasubdit TRLN Dit PRL sedang memberikan arahan dan materi



Gambar. Proses verifikasi peta eksiting dan peta rencana pemanfaatan ruang laut secara partisipatif dari setiap peserta KP yang hadir



Gambar. Hasil verifikasi peta eksiting dan peta rencana pemanfaatan ruang laut

Lampiran Berita Acara KP I Penyusunan Dokumen RZWP3K Sumsel

**BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN AWAL
RENCANA ZONASI WILAYAH PERSEBARAN DAN PULAU-PULAU KECIK (RZWP-3K)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (13 - 03 - 2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan Rapat Konsultasi Publik bertempat di Aula Dinas Wilayah Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Dokumen Awal Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan.

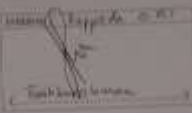
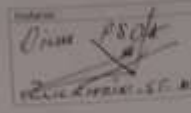

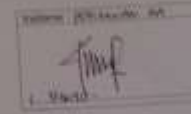
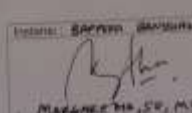

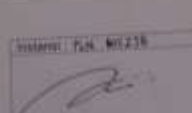

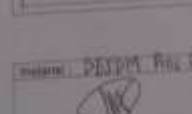
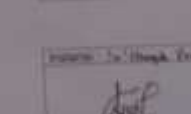
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, disimpulkan terdapat permasalahan terhadap Dokumen Awal Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Bappeda Sumsel dan WAHM menyampaikan masalah hukum adanya perubahan daerah perempungan laut sehingga perubahan akan dilakukan sesuai WAHM dan Peta secara resmi menyatakan perempungan. Untuk selanjutnya, pihak WAHM menyiapkan sendiri perempungan.
2. Bappeda Negeri/daerah dan Bappeda Kabupaten/Banyuwangi menyampaikan masalah mengenai peta dasar, data hidrografi, perikanan kelautan dan sumber peta tanggal 2013-2017 nilai peta 1:50.000.
3. Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan informasi bahwa Survei yang dilakukan sebagai kawasan perempungan nelayan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DK) menyampaikan lokasi perempungan laut adanya titik: TN Sungai Lempur.
5. Balai Taman Nasional Sembilang menyampaikan bahwa Kawasan Taman Nasional Sembilang meliputi zona perempungan sesuai SK Permenan Taman Nasional Sembilang atau SK Kawasan Pulau Sumatera Selatan dan Perubannya bisa menjadi Balai Perempungan Kawasan Pulau Palembang.
6. Balai RZK dan IFC, Ibu Berita dan Dabik Negeri Kelas I Sumatera Selatan menyampaikan bahwa data yang di cet bersama Kesayambandan dan Chartas Pelabuhan Cabang Palembang dan Data Navigasi Kelas I Sumatera Selatan disesuaikan dengan aturan yang ada.
7. Balai Ikan dan BPRK Wilayah II Palembang menyampaikan bahwa data ini merupakan kawasan darat dan perairan.
8. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Selatan menyetujui verifikasi peta.
9. Peserta menyepakati dan menyetujui jika permasalahan yang terdapat yang telah ada dan peta perempungan perempungan perempungan perempungan.

Untuk perbaikan Dokumen Awal Rencana Zonasi Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Sumatera Selatan sehingga sesuai substansi sesuai dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil, Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Provinsi, dan peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil lainnya.

Secara resmi, menandatangani perbaikan Dokumen Awal Rencana Zonasi Wilayah Persebaran dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Instansi: Bappeda Sumsel</p>  <p>Tanggal: 13/03/2018</p>	<p>Instansi: Dinas PSDA</p>  <p>PELUCUPRIK-SE-08</p>
<p>Instansi: DITJEN PER-01</p>  <p>TRE-01/04/01</p>	<p>Instansi: BAKOSURTANAL</p>  <p>Tanggal: 13/03/2018</p>
<p>Instansi: BAPPEDA BANGKAWAN</p>  <p>MARGARETHA, SP, M.Si</p>	<p>Instansi: DITJEN PER-01</p>  <p>Tanggal: 13/03/2018</p>
<p>Instansi: PUS. MIZIB</p>  <p>ANALIA</p>	<p>Instansi: Dinas Kelautan dan Perikanan (DK)</p>  <p>Meliana AB Rizal</p>
<p>Instansi: DITJEN PER-01</p>  <p>PETER HARJANO</p>	<p>Instansi: DITJEN PER-01</p>  <p>Tanggal: 13/03/2018</p>

Lampiran Daftar Hadir KP I Penyusunan Dokumen RZWP3K Sumsel

Lampiran :
Nomor : 605 / 154 / V / Dislutkan / 2018
Tanggal : 6 Maret 2018
Perihal : Daftar Undangan Rapat Konsultasi Publik Dokumen Awal RZWP3K

Peserta Pertemuan RZWP3K :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
15. Kepala Balitbangprovda Provinsi Sumatera Selatan
16. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cabang Palembang
17. Kepala Balai Taman Nasional Sembilang
18. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sumatera Selatan
19. Kepala Balai Pengelolaan DAS Musi
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan
21. Pimpinan PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Palembang
22. Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Selatan
23. Direktur PT. Telkom Wilayah Sumatera Selatan
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin
25. Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
27. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir

28. Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya
29. Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang
30. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
31. WALHI
32. Hutan Kita Institut
33. Wahana Buana Hijau
34. H. Naim (Tokoh Masyarakat)
35. Samuel Iskandar (Tokoh Masyarakat)

ISKINDO (Ikatan Sajana Kelautan Indonesia)